

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Permasalahan pokok dalam pembangunan ekonomi adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, dan penanggulangan kemiskinan. Di beberapa negara, tujuan tersebut masih menjadi dilema apakah sebuah negara tersebut ingin mementingkan tingkat pertumbuhan ekonomi atau mengurangi distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum jaminan akan ketidakmerataan distribusi pendapatan akan rendah.

Sudah menjadi suatu hal yang lazim di banyak negara berkembang, terutama negara-negara dengan proses pembangunan ekonomi yang sangat pesat seperti Indonesia, laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibarengi dengan tingkat kesenjangan ekonomi atau kemiskinan yang tinggi pula.

Distribusi pendapatan nasional merupakan sebuah unsur untuk mengetahui tinggi atau rendahnya kesejahteraan atau kemakmuran suatu negara. Distribusi pendapatan yang merata kepada masyarakat akan mampu menciptakan perubahan dan perbaikan suatu negara seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan sebagainya. Sebaliknya, jika distribusi pendapatan nasional tidak merata, maka perubahan atau perbaikan suatu negara tidak akan tercapai, hal seperti ini yang akan menunjukkan adanya ketimpangan distribusi pendapatan.

Investasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi distribusi pendapatan di Indonesia. Di Indonesia, kita hanya menjadi *market* bagi perusahaan asing untuk menanamkan modalnya di negara ini dan pengusaha asal Indonesia menjadi kaum yang paling dirugikan karena keberpihakan pemerintah tersebut. Tercatat, 90% perekonomian kita dikuasai asing dan sisanya adalah pengusaha Indonesia.<sup>1</sup>

Indonesia masih mengalami sejumlah hambatan iklim investasi dan kepastian hukum yang dikeluhkan oleh berbagai kalangan. Demikian pula, untuk meningkatkan aliran investasi, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), perlu diimbangi dengan kecepatan dan kemudahan perizinan<sup>2</sup>.

Investasi di Indonesia yang terjadi ada dua jenis, yaitu penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA). Tahun 2007 mencapai angka Rp 20.363,4 Milyar. Kemudian dari tahun 2009 hingga tahun 2012 realisasi penanaman modal dalam negeri terus mengalami peningkatan dari Rp 37.799,9 Milyar hingga yang terakhir mencapai angka Rp 92.182,0 Milyar.

Jumlah investasi yang dilakukan investor dalam negeri tidak hanya direkap keseluruhan dalam satu negara. Mereka juga melakukan investasi di daerah-daerah

---

<sup>1</sup>Novrizal Sikumbang-90 Persen Perekonomian Indonesia Dikuasai Asing  
<http://www.aktual.co/hukum/17323190-persen-perekonomian-indonesia-dikuasai-asing-> (diakses pada Selasa, 13 Mei 2014, pukul 13.30 WIB)

<sup>2</sup>Zul Sikumbang-Indonesia masih alami masalah soal investasi dan hukum  
<http://www.antaraneews.com/berita/328050/indonesia-masih-alami-masalah-soal-investasi-dan-hukum> (diakses pada 13 Mei 2014 pukul 13.00 WIB)

yang masih kurang untuk menjadi pusat pertumbuhan. Tercatat, dalam realisasi investor dalam negeri, masih banyak yang terjadi di pulau Jawa, Sumatra, dan Kalimantan. Pulau lain yang dijadikan pusat investasi dalam negeri masih kurang diminati.

Jumlah penanaman modal yang dilakukan investor asing di Indonesia juga sangat besar dan meningkat setiap tahunnya. Investasi yang dilakukan oleh investor asing yang terjadi di dalam negeri juga terus meningkat setiap tahunnya. Data dalam tabel 1.1 juga menunjukkan realisasi jumlah PMA dari tahun 2007-2012. Tahun 2008 mencapai angka US\$ 14871,4 dan terus naik hingga tahun 2012 mencapai angka US\$ 24564,7.

Investor asing tampaknya masih sulit untuk melakukan investasi di luar pulau Jawa. Tercatat, di enam provinsi pulau Jawa investasi yang dilakukan investor masing masih sangat besar terutama di provinsi DKI Jakarta yang mencapai angka diatas 3000 juta US\$ dibandingkan dengan pulau lain. Alasan utama tentu karena DKI Jakarta merupakan Ibukota Republik Indonesia, di Jakarta pula menjadi pusat pemerintahan dan juga ada pusat industri.

Inflasi juga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap distribusi pendapatan di Indonesia. Inflasi di Indonesia menunjukkan angka yang fluktuatif hampir setiap tahunnya. Dari data BPS, mulai dari tahun 2007 hingga tahun 2007 inflasi di Indonesia terus menunjukkan naik turun. Sejalan dengan naik turunnya inflasi dalam jangka menengah 2007-2012, Bank Indonesia akan mulai menurunkan tingkat BI Rate secara gradual. Sinergi antara komitmen Pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi makro selain memberi

dampak positif terhadap sisi penawaran, juga memberi dampak positif terhadap sisi permintaan.

Fenomena fluktuatif tersebut disebabkan oleh beberapa hal, beberapa diantaranya adanya krisis global yang terjadi pada tahun 2008, serta dampak dari diselenggarakannya pemilu pada tahun 2009. Hal-hal yang terjadi tersebut menuntut pemerintah untuk membuat suatu sinergi dari kebijakan baik secara fiskal maupun moneter, guna menstabilkan perekonomian. Inflasi secara nasional yang fluktuatif juga terjadi di semua provinsi. Tercatat dari tahun 2007-2012 hampir setiap provinsi di Indonesia mengalami inflasi secara naik turun.

Permasalahan pertambahan penduduk telah menjadi prioritas kebijakan dalam pembangunan di Indonesia. Diawali dengan perhatian pada pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan yang dibarengi dengan pengaturan pertumbuhan jumlah penduduk. Pemahaman yang berbeda terhadap perubahan penduduk serta faktor-faktor yang terkait dengannya memiliki pengaruh yang berbeda juga kepada kebijakan pemerintah.

Jumlah penduduk akan mempengaruhi distribusi pendapatan karena akan mempengaruhi kesempatan kerja dan upah. Semakin banyak penduduk akan mengakibatkan pendapatan perkapita yang tinggi<sup>3</sup>. Menurut data BPS, sensus penduduk yang dilakukan tahun 2010 menyatakan bahwa jumlah penduduk di Indonesia berjumlah 237.641.326 jiwa<sup>4</sup>. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk

---

<sup>3</sup> Arsyad Lincoln, *Ekonomi Pembangunan*, p.147

<sup>4</sup> Penduduk Indonesia menurut Provinsi 1971, 1980, 1990, 1995, 2000 dan 2010

[http://bps.go.id/tab\\_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id\\_subyek=12&notab=1](http://bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=12&notab=1) (diakses pada Selasa, 13 Mei 2014, pukul 13.30 WIB)

sendiri dari hasil sensus tersebut mencapai angka 1,49%. Namun dengan jumlah penduduk yang sedemikian banyak dengan laju pertumbuhan penduduk yang termasuk cukup tinggi di Indonesia belum dibarengi dengan tingginya kesempatan kerja dan tingginya tingkat partisipasi angkatan kerja.

Faktor lain yang menyebabkan masih timpangnya distribusi pendapatan salah satunya dengan memburuknya nilai tukar mata uang rupiah dengan mata uang asing. Negara sedang berkembang seperti Indonesia yang melakukan perdagangan dengan negara lain termasuk dengan negara maju, mengakibatkan permintaan barang-barang ekspor menjadi tidak elastis.

Rendahnya mobilitas sosial juga menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan. Minimnya perpindahan penduduk menjadikan sebuah masyarakat yang ada di daerah tertinggal sulit untuk maju hingga mengakibatkan ketimpangan.

Pelaksanaan kebijakan industri yang masih dilakukan pemerintah untuk melindungi golongan kapitalis. Dengan dilindunginya golongan kapitalis, membuat mereka semakin berkuasa dengan terus menambah kekayaan tanpa memikirkan masyarakat lain yang masih tertinggal.

Salah satu metode statistik yang umum digunakan untuk mengestimasi sejauh mana pencapaian tingkat pemerataan dalam distribusi pendapatan atau pengurangan kesenjangan ekonomi dalam suatu proses pembangunan ekonomi ialah dengan mengukur nilai koefisien atau rasio gini. Nilainya antara 0 dan 1, semakin mendekati 1 semakin timpang distribusi pendapatannya, begitupun

sebaliknya semakin mendekati angka 0, maka ketimpangan suatu negara akan rendah.<sup>5</sup>

Ketimpangan di Indonesia dari tahun 2007-2012 dengan menggunakan indeks koefisien gini terlihat meningkat di setiap tahunnya. Pada tahun 2007 mencapai angka 0,36 kemudian empat tahun setelahnya terus meningkat di tiap tahunnya menjadi 0,37 dan 0,38 kemudian yang terakhir mencapai angka 0,413. Sebuah angka yang cukup besar, namun proses pembangunan yang dilakukan pemerintah masih bisa dilakukan.

Pada tabel 1.1 dibawah ini menjelaskan bahwa dari tahun 2007-2012 semakin meningkatnya investasi dan juga inflasi namun tidak diikuti dengan meratanya ketimpangan distribusi pendapatan. Data investasi ada dua macam yaitu PMA dan PMDN dan dalam tabel 1.1 PMA serta PMDN disajikan dalam mata uang rupiah dimana PMA menggunakan kurs tengah untuk dijadikan rupiah.

**Tabel 1.1. Investasi, Inflasi, dan Koefisien Gini di Indonesia**

No	Keterangan	Tahun					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	PMA	10341,4	14871,4	10815,2	16214,8	19474,5	24564,7
2	PMDN	34878,7	20363,4	37799,8	60626,3	76000,70	92182,0
3	Inflasi	7,22	12,21	3,33	7,19	4,01	4,48
4	Rasio Gini	0,36	0,35	0,37	0,38	0,41	0,41

Sumber : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) (Data Diolah)

<sup>5</sup> Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan* p. 151

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya distribusi pendapatan diatas, maka beberapa faktor yang mempengaruhi distribus pendapatan adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh investasi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia?
2. Apakah terdapat pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia?
3. Apakah terdapat pengaruh inflasi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia?
4. Apakah terdapat pengaruh nilai tukar terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia?
5. Apakah terdapat pengaruh rendahnya mobilitas sosial terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia?
6. Apakah terdapat pengaruh kebijakan industri yang dilakukan pemerintah terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia?

## **C. Pembatasan Masalah**

Menurut identifikasi masalah diatas, ternyata masalah ketimpangan distribusi pendapatan memiliki penyebab yang sangat luas dan kompleks. Dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti baik dari segi dana, waktu, dan tenaga, maka penelitian ini dibatasi hanya pada masalah “Pengaruh Investasi dan Inflasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia”

#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. “Apakah terdapat pengaruh Investasi terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia?”
2. “Apakah terdapat pengaruh Inflasi terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia?”
3. “Apakah terdapat pengaruh Investasi dan Inflasi terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia?”

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Setiap penelitian diharapkan dapat berguna bagi semua pihak pembaca baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang perekonomian, serta sebagai bahan informasi dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya tentang pengaruh dari investasi dan inflasi serta implikasinya terhadap distribusi pendapatan di Indonesia.
2. Secara praktis, diharapkan sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan pemerintah dalam menentukan arah dan strategi pembangunan di masa mendatang serta sebagai bahan evaluasi bagi perencanaan dalam mengantisipasi pelaksanaan pembangunan ekonomi bangsa.